

LAPORAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2024



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN




MUHARRAM, ST.

NIP. 19680330 199803 1 006
Pembina Utama Muda

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN




MUHARRAM, ST.

NIP. 19680330 199803 1 006
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A..Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A..Pengukuran Kinerja	24
B..Analisis Capaian Kinerja	25
C..Realisasi Anggaran	47
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
E..Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	62
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	64
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	8
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
Tabel 2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel 2.4	: Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan.....	15
Tabel 2.5	: Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1	: Pengkategorian Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.6	: Nilai SAKIP DPRKP Tahun 2022 s/d 2024.....	47
Tabel 3.7	: Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP DPRKP	47
Tabel 3.8	: Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	50
Tabel 3.9	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran.....	57
Tabel 3.10	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan kegiatan	59
Tabel 3.11	: Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan...	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Pemberian rekomendasi perijinan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan rumah tangga belum memiliki akses aman;
3. Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum layak bagi masyarakat miskin dan daerah rawan kekeringan di perdesaan;
4. Kurangnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis perdesaan (kawasan agropolitan, minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa);
5. Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, menyebabkan masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan dalam kota;
6. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan
7. Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
8. Penyediaan PSU di perumahan dan permukiman masih rendah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh serta peningkatan Kualitas kawasan Permukiman;
2. Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR;
3. Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dan perkotaan;
4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman baik individual maupun komunal di perdesaan;
5. Pembangunan Sistem Drainase lingkungan di lingkungan perdesaan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

jj

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
- Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	105,37%	33,33 %	66,67 %	100%	100%
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	56,43%	33,33 %	66,67 %	100%	100%

NO	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94,79%	98,14 %	98,60 %	99,05 %	99,05%
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	19,96%	100,00 %	80,00 %	60,00 %	60,00%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	48,31%	58,53 %	59,53 %	60,53 %	60,53%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	59,35%	68,65 %	69,65 %	70,65 %	70,65%

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2024-2025

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT.	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	1.1	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung	(Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB / Jumlah seluruh bangunan gedung) X 100 %	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.2	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/ Laik Fungsi	%	Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Dokumen Pendataan Bangunan Gedung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT .	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	2.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	(Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah Kab. Pamekasan) X 100%	Data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
		2.2	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	Perbandingan jumlah luasan permukiman kumuh yang menurun apabila dibandingkan dengan jumlah luasan daerah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan dalam persen (%)	(Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/Luas Wilayah) X 100%	SK Bupati tentang Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
		2.3	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	(Jumlah rumah tangga dengan air minum layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	Data Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		2.4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	Perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	(Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	Data Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pamekasan
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai SAKIP	Poin	Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Penilaian SAKIP 2023 : - Perencanaan Kinerja 30% - Pengukuran Kinerja 30% - Pelaporan Kinerja 15% - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%	Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
	1.1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	33,33
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	%	33,33
	1.2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	98,14
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	%	100
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	58,53

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	68,65
	1.3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	A

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 mengalami 2 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Terjadinya perubahan Perjanjian Kinerja pada bulan November 2024 dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran di beberapa kegiatan fisik sehingga dapat mempengaruhi target dan indikator kinerja sebelumnya. Dari evaluasi tahun sebelumnya dimana ketika perubahan anggaran kegiatan pengesahannya selalu mepet dengan akhir tahun sehingga kegiatan tambahan tersebut tidak mungkin dilaksanakan maka target kerja dibuat sama dengan sebelum perubahan, hanya capaian anggarannya saja yang mengalami perubahan

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET AWAL	TARGET REVISI
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	1.1	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%	33,33%
		1.2	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	33,33%	33,33%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET AWAL	TARGET REVISI
1	2	3		4	5
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	2.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,14%	98,14%
		2.2	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	100,00%	100,00%
		2.3	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%	58,53%
		2.4	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%	68,65%
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai SAKIP	A	A

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 ini.

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 189.875.267.716 yang digunakan untuk melaksanakan 12 (Dua Belas) Program, 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.03.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	67,09%	Rp34.590.884.90 0
1.03.0 3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	8 SPAM	Rp34.590.884.90 0
1.03.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,22%	Rp13.761.135.70 0
1.03.0 5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	10 SPALD	Rp13.761.135.70 0
1.03.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	249,87 Ha	Rp2.687.944.300
1.03.0 6.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	2 Sistem Drainase	Rp2.687.944.300

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	33,33%	Rp4.407.000.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp4.407.000.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik	33,33%	Rp121.225.396.050
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	Rp121.225.396.050
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	92,16%	Rp300.000.000
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Rp200.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp300.000.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	71,14%	Rp200.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Rp269.800.000
1.04.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp269.800.000
1.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Rp3.503.094.826
1.04.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp3.503.094.826
1.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80%	Rp79.000.000
1.04.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	60 ORANG	Rp79.000.000
1.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	Rp1.767.011.940
1.04.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	5 Sarana	Rp304.677.086
1.04.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	Rp286.484.854
1.04.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	Rp747.900.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.04.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	Rp427.950.000
1.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	22,22%	Rp767.500.000
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	22,22%	Rp0
1.04.0 2.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	22,22%	Rp717.500.000
1.04.0 2.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	33,33%	Rp50.000.000
1.04.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	100%	Rp1.029.000.000
1.04.0 3.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	33,33%	Rp50.000.000
1.04.0 3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Penataan	Rp385.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.04.0 3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	1 Peningkatan Kualitas	Rp594.000.000
1.04.0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2,42%	Rp4.987.500.000
1.04.0 4.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	Rp4.987.500.000
1.04.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,67%	Rp50.000.000
1.04.0 5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	33,33%	Rp50.000.000
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	33,33%	Rp250.000.000
2.10.5 .201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	1 Koordinasi	Rp250.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja awal periode Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 93,25% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis namun besaran hasil capaian tersebut masih dalam kategori “Cukup”. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart				
1.	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%	29,06%	87,19%
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	33,33%	30,69%	92,08%
Sasaran 2 Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat				
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,14%	94,93%	96,73%
2.	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	100,00%	98,51%	98,51%
3.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%	49,71%	84,92%
2.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%	66,65%	97,09%
Sasaran 2 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				
1.	Nilai SAKIP	85	81,80	96,24%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 7 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standart
--

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1. Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%	29,06%	87,19%
1.2. Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi	33,33%	30,69%	92,08%

1.1. Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung

Indikator "prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung" mengukur tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam pembangunan, pengoperasian, serta pemeliharaan bangunan gedung. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan bangunan. Implementasi PBG diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun memenuhi standar teknis yang ditetapkan, serta memastikan bahwa bangunan tersebut aman digunakan. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa suatu bangunan gedung sudah memenuhi standar teknis,

keselamatan, dan kelayakan untuk digunakan sesuai fungsinya. Implementasi penerbitan SLF dilaksanakan setelah bangunan selesai dibangun dan siap digunakan.

Dalam kegiatan ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan rekomendasi penilaian terkait kesesuaian fungsi bangunan gedung untuk kemudian dilanjutkan ke Dinas PMPTSP yang akan menerbitkan dokumen PBG dan SLF tadi.

Capaian indikator dihitung berdasarkan persentase jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG dari target bangunan gedung ber-PBG pada tahun n. rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	=	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang ber-IMB}}{\text{Jumlah target bangunan gedung ber-IMB Tahun n}} \times 100\%$
---	---	--

Capaian kinerja pada indikator sasaran prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung bisa dikatakan masuk dalam kategori Cukup Baik karena capaian kinerjanya 88% dari target kinerja 200 dokumen PBG berhasil di realisasikan sebanyak 176 dokumen PBG yang terbit di tahun 2024. Meskipun ada selisih 12% atau 24 dokumen PBG dari target, ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan efektivitas, dan dengan strategi yang tepat, pencapaian target bisa terwujud. Jumlah masyarakat atau pemohon untuk mengurus PBG dan SLF dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan bangunan gedung tahun 2024 tidak sebesar pada tahun sebelumnya dimana realisasi penerbitan dokumen PBG lebih besar daripada target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya bisa melebihi 100%.

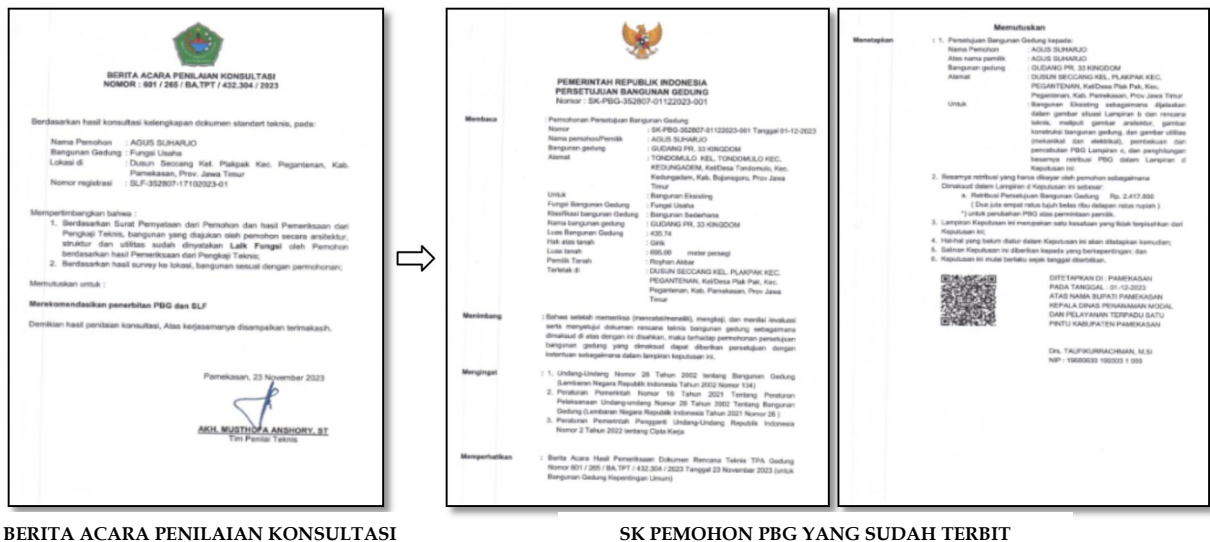
Target dan Realisasi PBG

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
200	244	200	234	200	176

Sumber data : Form E-81 Monev Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 dan tahun 2023 realisasi kinerjanya semakin turun namun masih melebihi dari target dokumen PBG yang akan diterbitkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 realisasinya juga semakin turun bahkan tidak mencapai target 200 dokumen yang ditetapkan pada tahun tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBG dan proses pengajuannya. Masih banyak masyarakat atau pemilik bangunan gedung yang tidak tahu atau kurang paham dalam pengajuan PBG, kurang pahamnya pemohon terhadap penggunaan aplikasi SIMBG sehingga mengakibatkan lamanya proses permohonan dan rendahnya jumlah pengajuan. Solusinya pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas di Mall Pelayanan Publik yang sudah ditugaskan khusus melayani permohonan PBG. Dilihat dari capaian anggarannya sebesar 69,3% ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang digunakan lebih rendah namun kinerja yang dicapai sudah lebih tinggi sehingga bisa diartikan ada upaya peningkatan kualitas kerja atau pencapaian tujuan yang lebih efisien meskipun sumber dayanya terbatas. Adapun tingkat efisiensinya setelah diketahui besaran capaian kinerja dan capaian anggarannya yaitu sebesar 27,01%.

Indikator sasaran ini tidak memiliki pembanding dengan target nasional dan target provinsi dikarenakan tidak termasuknya indikator sasaran ini pada salah satu sasaran strategis nasional terkait infrastruktur pelayanan dasar. Setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda sehingga indikator sasaran ini mungkin lebih fokus pada kondisi lokal, sumber daya serta sistem evaluasi yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan dan kondisi daerah Kabupaten/Kotanya. Berikut adalah dokumentasi dokumen berita acara PBG yang di rekomendasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan dokumen PBG yang sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



1.2. Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi.

Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Indikator sasaran ini mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan standar kualitas dan kelayakan fungsi bangunan gedung pemerintah. Gedung yang "berkualitas" diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan untuk digunakan. Sementara itu, "laik fungsi" berarti gedung tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya tanpa gangguan atau resiko keselamatan. Program pendukung Indikator sasaran ini yaitu program penataan bangunan gedung, dan program pengembangan jasa konstruksi. Capaian kinerja pada indikator sasaran ini bisa dikatakan cukup baik dengan capaian kinerja 92,08%. Pada program penataan bangunan gedung tahun 2024 sudah terealisasi 9 gedung kantor pemerintahan dan satu gedung kawasan monumen arek lancor yang direhabilitasi dan direnovasi. Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Pamekasan juga sudah terealisasi mulai dari perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pengawasannya.

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini juga dipengaruhi oleh program pengembangan jasa konstruksi dimana program ini merupakan penunjang tercapainya indikator sasaran tersebut. Kinerja program penataan bangunan gedung akan sangat bergantung pada kualitas jasa konstruksi yang digunakan. Jika program pengembangan jasa konstruksi berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerja dan standar praktik konstruksi, maka bangunan yang ditata atau direnovasi akan lebih berkualitas, tahan lama, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengembangan sumber daya manusia dan inovasi dalam konstruksi akan mendukung tercapainya bangunan gedung yang berkualitas, aman, dan laik fungsi. Sebaliknya, penataan bangunan gedung yang efektif akan memberikan peluang bagi jasa konstruksi untuk berkembang dengan lebih baik, menciptakan permintaan yang lebih tinggi akan tenaga terampil dan standar konstruksi yang lebih ketat. Pada program pengembangan jasa konstruksi ada beberapa kegiatan yang targetnya tidak tercapai seperti pada kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, serta Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota.

rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$= \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
--	--

Pada kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi jenjang 5 dan jenjang 6 tahun 2024, peserta yang mengikuti pelatihan melebihi dari target 100 orang yaitu 160 orang, namun pada hari kedua saat uji sertifikasinya ada yang beberapa tidak hadir dengan alasan sakit, dll, sehingga dari target 100 orang, yang bisa ikut uji sertifikasi dan dinyatakan lulus ada 88 orang. Pada kegiatan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi

dari target 100 lembaga jasa konstruksi yang dibina tertib usahanya hanya terealisasi 74 lembaga. Pada kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi Kabupaten/Kota hanya terealisasi 48 paket pekerjaan jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi dari target 100 paket pekerjaan. Hal-hal tersebut diatas bisa mempengaruhi hasil capaian kinerja dari indikator sasaran prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi, karena program pengembangan jasa konstruksi memiliki kontribusi langsung terhadap kinerja program penataan bangunan dan gedung dimana semakin terampil dan kompetennya tenaga kerja konstruksi akan menghasilkan konstruksi dan renovasi bangunan yang lebih baik, lebih aman dan sesuai dengan fungsinya. Solusi ke depannya untuk kegiatan yang belum tercapai target kinerja terutama dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu akan melakukan kegiatan studi tiru ke Dinas Serumpun di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang gradenya A dan sudah melakukan kegiatan pengawasan dan juga membuat aplikasi yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan pengawasan yang memuat data company profil dari badan usaha

**Perbandingan Capaian Kinerja Prosentase Pemenuhan Bangunan
Gedung Pemerintah yang Berkualitas/Laik Fungsi**

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
59,30%	94,00%	70,54%	92,08%

Berdasarkan pada tabel diatas, Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dimana capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu 70,54% namun menurun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 94,00%. Meskipun sudah ada peningkatan yang signifikan Dinas tetap akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ke depannya untuk semakin meningkatkan kinerja yang lebih efektif lagi.

Indikator sasaran ini juga tidak memiliki pembandingan dengan target nasional dan target provinsi dikarenakan bukan termasuk dalam

sasaran strategis terkait infrastruktur pelayanan dasar. Selain itu tidak adanya pembanding tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi spesifik daerah, kebijakan, serta keterbatasan teknis dan sumber daya.

Tingkat Efisiensi pada indikator sasaran prosentase pemenuhan pembangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi bergantung pada keseimbangan antara capaian kinerja dan capaian anggaran. Jika capaian kinerja tinggi dengan anggaran yang optimal, efisiensi dianggap baik. Namun, jika anggaran terserap tinggi tetapi output rendah, berarti terjadi pemborosan. Pada indikator sasaran ini capaian anggaran yang terserap yaitu sebesar 61,44% dimana capaian kinerjanya sudah mencapai 92,08%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemanfaatan anggaran, namun pada kenyataannya tingkat efisiensi yang mencapai 30,64% ini terjadi karena faktor sementara seperti keterlambatan pembayaran atau gagal bayar di tahun 2024.



Rehab gedung kantor Diskominfo



Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jenjang 5 dan Jenjang 6



Uji SKK Jenjang 5 dan Jenjang 6

**Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat**

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat” adalah sebagai berikut:

Indikator		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
2.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,14%	94,93%	96,73%
2.2	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	100,00%	98,51%	98,51%
2.3	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%	49,71%	84,92%
2.4	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%	66,65%	97,09%

2.1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

indikator sasaran ini merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dimana sasaran dari kegiatan ini adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) dan/atau keluarga miskin yang menempati rumah yang tidak layak untuk dihuni. Persyaratan penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan RTLH ini yaitu memiliki KTP/Identitas diri yang berlaku, memiliki/menguasai sebidang tanah yang cukup yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang sah, belum memiliki rumah, belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah darimanapun, berpenghasilan paling besar senilai upah minimum Kabupaten, Bersedia swadaya, bersedia menyelesaikan kegiatan perbaikan RTLH hingga dapat dihuni secara layak, dan bersedia menghuni kembali rumah yang telah diperbaiki setelah selesai. Besaran bantuan penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH untuk setiap penerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000 yang digunakan untuk pembelian material bahan bangunan (Rp. 15.000.000) dan pembayaran upah kerja (Rp. 2.500.000).

Program yang mendukung capaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dimana salah satu program tersebut merupakan Program yang mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan jenis pelayanan dasarnya yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Total rumah yang telah dilaksanakan perbaikan terhadap rumah yang tidak layak huni tahun 2024 yaitu sejumlah 527 unit rumah termasuk rumah yang terdampak bencana, TMMD

(Tentara Manunggal Masuk Desa) rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), sehingga rumah layak huni semakin bertambah dari yang sebelumnya sejumlah 214.950 rumah menjadi 215.477 rumah yang layak huni dan jumlah rumah tidak layak menjadi berkurang dari 4.845 RTLH menjadi 4.318 dari total rumah kabupaten pamekasan tahun 2024 yaitu sebesar 271.111 unit rumah. Berikut adalah formulasi perhitungan indicator capaian ketersediaan rumah layak huni :

$$\text{Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dari indicator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu 96,41% dimana dari target kinerja 98,14% terealisasi sebesar 94,62%. Hal tersebut disebabkan karena realisasi pada kegiatan SPM (Program Pengembangan Perumahan) hanya terealisasi 11 rumah dari target 21 unit rumah yang diperbaiki pasca bencana sehingga pemenuhan SPM nya tidak mencapai 100%. Khusus program yang berkaitan dengan SPM Perumahan Rakyat ini diperlukan evaluasi dan strategi yang lebih efektif untuk dapat menetapkan target perbaikan RTLH bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah, karena tantangannya adalah bencana alam yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. Sedangkan pada Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh target unit rumah yang diperbaiki 285 unit sudah terealisasi semua atau tercapai 100% kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
96,00%	96,79%	94,79%	96,73%

Dari data yang ditampilkan diatas dapat kita lihat trend kenaikan capaian kinerja pada tahun 2022 dan penurunan capaian kinerja di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan jumlah perbaikan rumah tidak layak huni semakin sedikit setiap tahunnya, tidak seperti pada tahun 2022 dimana program RTLH yang menjadi program prioritas Bupati tersebut mendapatkan anggaran yang prioritas juga.

Pendanaan yang terbatas pada tahun 2023 dan 2024 ini menunjukkan penurunan jumlah target perbaikan RTLH.

Perbandingan Target Nasional dengan Provinsi dan Kab/Kota

Target Nasional	Target Provinsi	Target Kab/Kota
70,00%	75,44%	98,14%

Perbedaan target diatas ini mencerminkan adanya perbedaan dalam prioritas pembangunan, kapasitas sumber daya, dan konteks lokal yang dihadapi oleh masing-masing tingkat pemerintahan. Selain itu tantangan di tingkat nasional dan tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota berbeda. Meskipun targetnya lebih rendah, tantangan yang dihadapi nasional lebih besar, lebih beragam dan lebih kompleks dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada indikator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni memiliki tingkat efisiensi yang baik karena capaian kinerjanya lebih besar dibandingkan capaian anggarannya yaitu sebesar 86,11%, sehingga tingkat efisiensi pada indicator sasaran ini yaitu 10,31%. Meskipun efisiensi kinerja indicator ini sudah baik, namun masih diperlukan upaya untuk semakin meningkatkan efisiensi program perbaikan RTLH ini selain dengan optimalisasi anggaran juga perlu menggandeng sektor swasta, LSM dan masyarakat untuk berpartisipasi juga dalam program RTLH ini sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini.



0%



50%



75%



100%

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2024 (Reguler)



0%



25%



75%



100%

Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

2.2. Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan secara fisik, social, ekonomi dan budaya. Maka dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat mengurangi dan

menurunkan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan. Peningkatan kualitas lingkungan yang dilaksanakan yaitu melalui Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya dan penyusunan dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagai dokumen perencanaan teknisnya. Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya ini berupa pembangunan jalan lingkungan atau pavingisasi di kawasan strategis Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil output dari dokumen Reviu RP2KPKPK kemarin dihasilkan salah satunya luasan kawasan kumuh baru pada tahun 2024 yang sudah terinput di aplikasi SIKAWANKU (Sistem Informasi Kawasan Kumuh) yaitu seluas 173,13 Ha. Namun luasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah yang dibawah 10Ha yaitu 81,4 Ha dengan luasan penanganan kumuh seluas 8,37 Ha sehingga sisa luasan kumuhnya di tahun 2024 sebesar 73,03 Ha.

LUASAN KUMUH TAHUN 2024

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH AWAL (Ha)	PENANGANAN KUMUH (Ha)	SISA LUASAN KUMUH (Ha)
1	Kawasan Branta Pesisir	8,78	0	8,78
2	Kawasan Bulay	3,14	0	3,14
3	Kawasan Gladak Anyar 1	9,86	0	9,86
4	Kawasan Gladak Anyar 2	0,64	0	0,64
5	Kawasan Kolpajung	3,47	3,47	0
6	Kawasan Jungcangcang1	2,72	2,72	0
7	Kawasan Kowel	5,73	0	5,73
8	Kawasan Larangan Tokol	2,1	0	2,1
9	Kawasan Palengan Laok	5,06	0	5,06
10	Kawasan Panempan	3,48	0,79	2,69
11	Kawasan Parteker	1,04	0	1,04
12	Kawasan Patemon	3,79	1,39	2,4

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH AWAL (Ha)	PENANGANAN KUMUH (Ha)	SISA LUASAN KUMUH (Ha)
13	Kawasan Seddur	3,55	0	3,55
14	Kawasan Tamberu	8,19	0	8,19
15	Kawasan Teja Timur	3,86	0	3,86
16	Kawasan Tlontoraja	4,9	0	4,9
17	Kawasan Toronan	6,42	0	6,42
18	Kawasan Waru Barat	4,67	0	4,67
		81,4	8,37	73,03

Sumber : Aplikasi SIKAWANKU

Aplikasi ini merupakan sebuah sistem pengelolaan, pengolahan dan pemutakhiran data berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Geographic Information System (GIS) kawasan kumuh yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan infrastruktur permukiman seperti pembangunan jalan lingkungan atau pavingisasi di kawasan strategis perdesaan dan perkotaan merupakan bentuk intervensi dan kontribusi pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam upaya penurunan luasan kawasan kumuh.

Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	=	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha}} \times 100\%$
--------------------------------	---	---

Berdasarkan tabel diatas luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani adalah sebesar 8,37ha dari total luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha 81,4ha, sehingga sisa luasan kumuh di tahun 2025 yaitu sebesar 73,03ha.

Pekerjaan pavingisasi yang merupakan salah satu intervensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penurunan luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dilaksanakan melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan juga Program Kawasan Permukiman pada dokumennya. Dari target 535 paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sudah terealisasi 528 paket pekerjaan yang telah dibangun sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,51% . Capaian kinerja ini semakin

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2023 capaian kinerjanya 95,06% dan pada tahun 2022 capaian kinerjanya 71,98%.

Perbandingan Capaian Kinerja prosentase Luasan Kawasan Kumuh

TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
71,98%	95,06%	98,51%

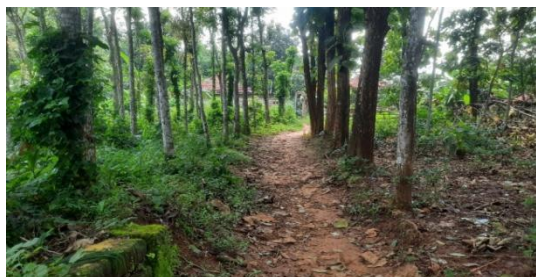
Mengevaluasi dari capaian kinerja tahun 2022 kemarin dimana penambahan anggaran pada saat pengesahan PAK, target kinerja juga ditambahkan sedangkan kegiatan fisik tambahannya tidak mungkin dilaksanakan karena mepetnya waktu pengesahan PAK dengan akhir tahun. Sehingga pada tahun 2023 dan tahun 2024 ketika ada perubahan anggaran kegiatan (PAK) targetnya tidak ditambahkan kedalam target kinerja perubahan sehingga capaian kinerja tetap terhadap target sebelum PAK. Untuk tingkat efisiensi pada indikator sasaran ini yaitu sebesar 30,19% dimana capaian anggarannya masih lebih rendah daripada capaian kinerjanya yaitu sebesar 68,32%. Tingginya tingkat efisiensi ini disebabkan karena adanya serapan anggaran yang tidak optimal dikarenakan gagal bayar.



0%



100%



0%



100%

**PBL Kawasan Agropolitan Dusun Batas Barat Desa Bicorong
Kecamatan Pakong**

2.3. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran diatas mengacu pada persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih dari sumber yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Sumber air minum layak meliputi sambungan rumah dari jaringan perpipaan (PDAM), sumur terlindungi, dan mata air terlindungi. Implementasi dari indicator ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan air minum layak di wilayah perkotaan dan perdesaan. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum menjadi penunjang indicator sasaran ini dimana pada tahun 2024 sudah terealisasi 1.273 SR dari target 1.499 SR. sehingga capaian kinerja yang dihasilkan yaitu 84,92%.

Proporsi RT dengan akses air minum layak	=	$\frac{\text{Jumlah RT dengan akses air minum layak jaringan perpipaan}}{\text{Total Jumlah RT}} \times 100\%$
--	---	--

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya cenderung meningkat karena capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 83,97%.

Perbandingan capaian kinerja proporsi RT yang mendapatkan akses air minum layak jaringan perpipaan

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
94,63%	77,78%	83,97%	84,92%

Berdasarkan pada tabel perbandingan capaian diatas pada Tahun 2022 capaian kinerjanya menurun. Hal ini dikarenakan adanya Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang mana target kegiatannya ikut dimasukkan padahal kegiatan tersebut jelas tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan mepetnya waktu pelaksanaan dengan akhir tahun. Karena nilai pembagiannya semakin besar maka berpengaruh pada nilai capaian kinerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari 2022 maka tahun 2023 dan tahun 2024 capaian kinerjanya mulai

semakin ada peningkatan. Kendati demikian masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan terutama yang terkait dengan pengeboran air bersih. Faktor yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya CV/rekanan yang mempunyai alat pengeboran air bersih dan juga untuk melakukan pengeboran harus mengantongi izin dari provinsi, selain itu juga sulit ditemukannya titik lokasi sumber air sehingga kegiatan pembangunan system penyediaan air minum jaringan perpipaan beberapa ada yang tidak terealisasi. Solusi ke depannya mungkin akan mengurangi kegiatan pembangunan SPAM untuk kemudian diperbanyak di kegiatan peningkatan dan perluasan dan optimalisasi SPAM jaringan perpipaan.

Perbandingan Target Nasional dengan Provinsi dan Kab/Kota

Target Nasional	Target Provinsi	Target Kab/Kota
100,00%	100,00%	58,53%

Keselarasan Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur menetapkan target 100% terhadap akses air minum layak perpipaan sebagai bagian dari komitmen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. hal ini mencerminkan harapan agar penduduk indonesia memiliki akses air bersih yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan pada target Kabupaten/Kota yang rendah 58,53% mengindikasikan bahwa masih adanya keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur yang belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, pendanaan, atau tantangan geografis yang beragam membuat target 100% sulit dicapai dalam jangka pendek.

Tingkat efisiensi 16,99% dari indicator sasaran ini dianggap baik disebabkan karena hasil capaian kinerjanya lebih kecil daripada hasil capaian anggarannya yaitu 67,95%. Kondisi efisiensi ini bisa dibilang tidak ideal karena ada serapan anggaran yang tertunda pembayarannya sehingga capaian anggarannya rendah.



Pengeboran Air Bersih



Tandonisasi



Pipanisasi



Sambungan Rumah

Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan

2.4. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran ini merupakan suatu perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini ditunjang dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Pembangunan tangki septik individual di permukiman perdesaan dan tangki septik komunal di lingkungan pondok pesantren pada program air limbah sudah terlaksana semua, namun pada program drainase belum terealisasi semua dari total target 13 lokasi hanya terealisasi 9 lokasi. Hal ini dikarenakan kesiapan lokasi yang terdampak belum siap kejelasan aliran

drainasenya, pihak CV/mitra kerja kurang responsive dalam menyikapi hal kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja indikator sasaran. Sebaliknya lokasi pembangunan dan peningkatan sistem drainase lingkungan yang telah terealisasi mengindikasikan bahwa perencanaan teknisnya berjalan dengan baik mulai dari penetapan lokasi, survey, penyusunan KAK, RAB, desain teknis, ketersediaan mitra kerja atau CV sampai ke pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan lancar. Adapun realisasi kinerja pada indicator sasaran ini tahun 2024 yaitu 66,65% dari target 68,65% sehingga capaian kinerja tercapai 97,09%.

TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
55,74%	87,74%	97,09%

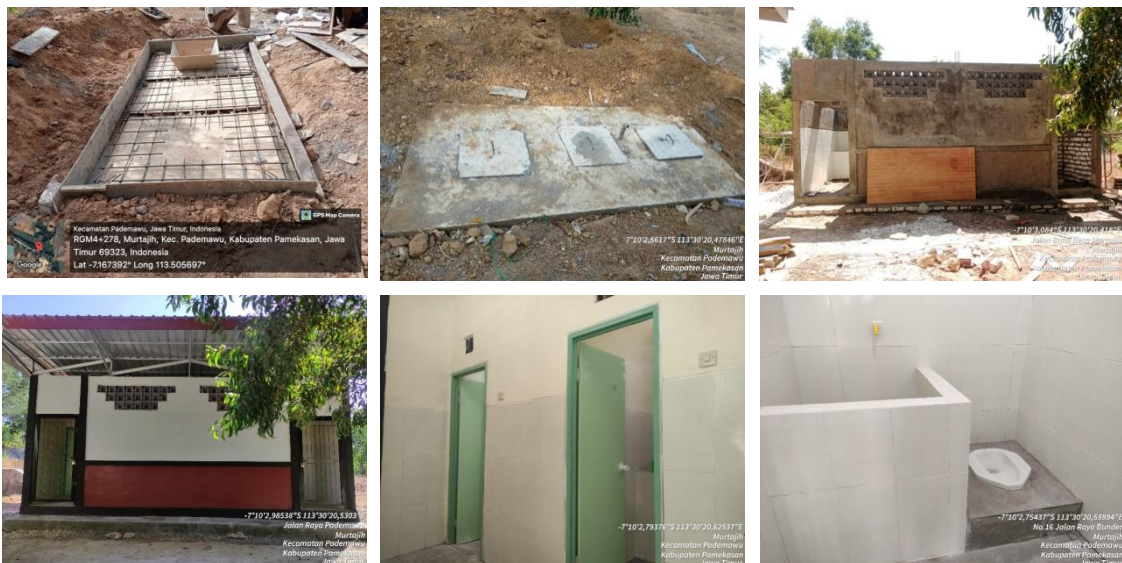
Apabila dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya maka capaian tahun 2024 cenderung naik. Penurunan capaian kinerja pada tahun 2022 pada tabel diatas disebabkan karena adanya perubahan target dan anggaran kegiatan yang mendekati akhir tahun sehingga target lokasi kegiatan yang awalnya 8 lokasi menjadi 35 lokasi. Hal ini menyebabkan capaian kinerjanya rendah. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada tahun 2022 tersebut maka solusi kedepannya tidak perlu menambahkan target kinerja apabila ada perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang pengesahannya mepet dengan akhir tahun. Kenaikan capaian kinerja pada tahun 2024 ini bisa dikatakan suatu keberhasilan yang cukup baik, karena diawali dengan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta SDM yang memiliki kompetensi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder.

Perbandingan Target Nasional dengan Provinsi dan Kab/Kota

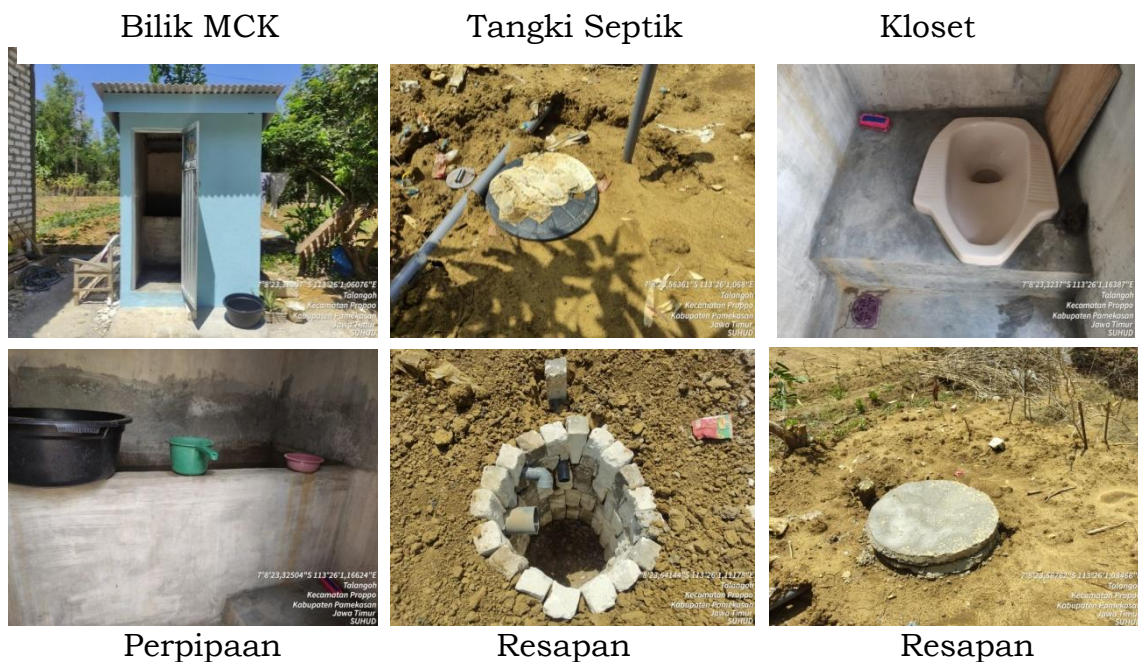
Target Nasional	Target Provinsi	Target Kab/Kota
90,00%	95,00%	68,65%

Perbedaan target yang cukup signifikan antara target sanitasi layak nasional (90%) dan provinsi (95%) pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan masih menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan infrastruktur sanitasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih banyak yang belum mampu membangun fasilas sanitasi layak sehingga masih banyak juga yang belum mendapatkan akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang baik. Penetapan target nasional 90% untuk akses sanitasi layak sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's sampai tahun 2030. Provinsi menetapkan target lebih tinggi yaitu 95%, mencerminkan komitmen dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dengan mengukur rasio antara capaian penganggaran dan capaian kinerja kegiatan sanitasi akses layak ini maka dapat diketahui tingkat efisiensi yang dicapai yaitu 10,74% dimana capaian kinerjanya lebih besar daripada capaian anggaran yang diserap, yaitu sebesar 86,35%. Untuk kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2024 solusinya akan dilanjutkan pekerjaannya di tahun berikutnya, dimana kegiatan lanjutan ini bisa dilaksanakan di awal tahun 2025 karena dokumen perencanaannya sudah ter sedia.



Pembangunan/Rehabilitasi MCK Pondok Pesantren



Pembangunan Bilik MCK dan Tangki Septik Individual

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
3.1 Nilai SAKIP	85	81,80	96,24%

3.1 Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal 100% ten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel diatas, Nilai AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan nilai 81,80 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan, ditandai dengan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran telah dilakukan sampai ke level 4 atau pengawas/Sub koordinator. Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
NILAI HASIL EVALUASI		100	81,80
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			A

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022 s.d 2024**

2022	2023	2024
83,95	80,45	81,80

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

**Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2024**

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
85	83,95	98,76	85	80,45	94,65	85	81,80	96,24

Terdapat penurunan terhadap penilaian capaian kinerja SAKIP pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun setelah mendapatkan perhatian terhadap hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya maka pada tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berhasil mengalami peningkatan. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada komponen SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya, diantaranya :

1. Renstra DPRKP sudah menjabarkan isu strategis dan dijawab dengan perencanaan kinerja baik sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, namun ada inkonsistensi pada sasaran di 4.1 dan 4.2 yaitu pada meningkatnya bangunan gedung sesuai dengan standart;
2. Terdapat keidaksesuaian antara sasaran pada Renstra dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja eselon II yaitu sasaran ke-2;

3. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi E-Monev namun belum dilakukan analisis tentang capaian kinerja dan tindak lanjutnya;
4. Analisa capaian kinerja pada laporan kinerja secara umum telah disajikan dengan baik namun analisisnya perlu dipertajam lagi agar dapat memberikan pemahaman dan informasi atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bagi para pembaca;
5. Analisis yang ada tidak menyertakan informasi terkait data dan formulasi perhitungan capaian indikator kinerjanya;
6. Belum terdapat perbandingan/benchmark capaian kinerja dengan level provinsi maupun nasional;
7. Indikator kinerja pada laporan kinerja belum disertai dengan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya;
8. Analisis ketidaktercapaian kinerja masih belum memadai karena belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang menunjang capaian tersebut;
9. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi kinerja karena tidak terdapat rencana aksi peningkatan SAKIP hasil tindak lanjut evaluasi.

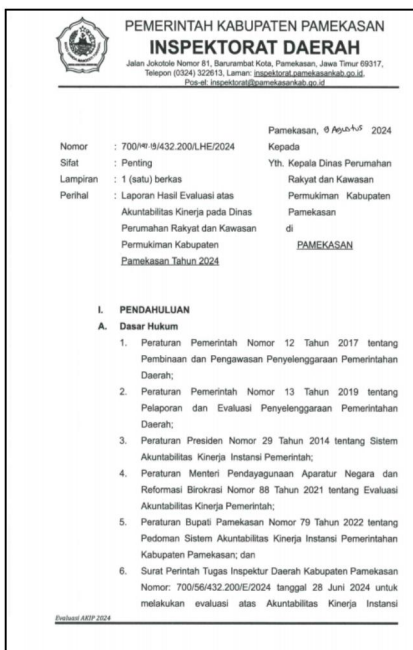
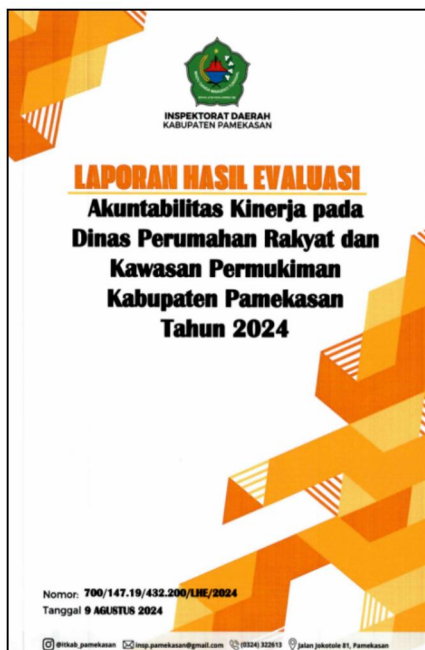
Berdasarkan beberapa uraian dan kondisi atas kelemahan atau kekurangan untuk komponen manajemen kinerja tadi maka direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perlu disusun dengan lebih cermat sehingga tetap konsisten dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya;
2. Sebaiknya DPRKP dapat memanfaatkan pengukuran kinerja yang ada, apalagi sudah menggunakan aplikasi sehingga dapat menentukan rencana tindak lanjut dengan lebih baik;

3. Perlu melakukan penajaman analisa pada setiap indicator yang ada pada tujuan dan sasaran strategis;
4. Perlu menyertakan informasi terkait data dan formulasi perhitungan capaian indicator kinerjanya;
5. Perlu melakukan perbandingan/benchmark capaian kinerja dengan level provinsi maupun nasional serta memberikan analisa singkat atas perbandingan capaian kinerja tersebut;
6. Perlu memberikan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang di seluruh indicator kinerja baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai realisasinya;
7. Gaya penulisan disesuaikan seperti analisis capaian kinerja sasaran strategis 3 “Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah”;
8. Dalam analisis capaian kinerja perlu menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang capaian tersebut;
9. Membuat rencana aksi peningkatan SAKIP hasil tindak lanjut evaluasi, sehingga hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menunjukkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Nilai SAKIP 2025, diantaranya :

1. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh bagian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP
2. Melakukan revidi terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Melakukan evaluasi mandiri internal
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Implementasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



7			
rincian hasil evaluasi sebagai berikut:			
No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A
Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja Komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu: a. Keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot 6%; b. Kualitas/mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot 9%; dan c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup renstra, renja, perjanjian kinerja, dan dokumen lainnya yang mendukung perencanaan anggaran, seperti RKA dan DPA. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui perjanjian kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Untuk mengelola perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,			

LHE SAKIP DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	34.590.884.900,00	23.502.782.520,00	67,95%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	34.590.884.900,00	23.502.782.520,00	67,95%
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	650.000.000,00	93.482.100,00	14,38%
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipa	11.838.500.000,00	6.617.495.160,00	55,90%
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipa	15.165.667.000,00	10.967.957.660,00	72,32%

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.877.083.000,00	2.820.724.800,00	98,04%
1.03.03.2.01.00 31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.099.224.000,00	2.155.526.900,00	69,55%
1.03.03.2.01.00 24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	860.410.900,00	817.280.900,00	94,99%
1.03.03.2.01.00 30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	30.315.000,00	30,32%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13.761.135.700,00	12.338.591.000,00	89,66%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.761.135.700,00	12.338.591.000,00	89,66%
1.03.05.2.01.00 41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	650.000.000,00	190.331.000,00	29,28%
1.03.05.2.01.00 27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.590.033.700,00	1.399.715.000,00	88,03%
1.03.05.2.01.00 40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	3.815.000,00	3,82%
1.03.05.2.01.00 34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	100.000.000,00	81.975.000,00	81,98%
1.03.05.2.01.00 35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	55.150.000,00	55,15%
1.03.05.2.01.00 38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.05.2.01.00 29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00%
1.03.05.2.01.00 23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	10.621.102.000,00	10.557.605.000,00	99,40%
1.03.05.2.01.00 37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	200.000.000,00	0,00	0,00%

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.687.944.300,00	1.864.531.330,00	69,37%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.687.944.300,00	1.864.531.330,00	69,37%
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.912.944.300,00	1.221.018.330,00	63,83%
1.03.06.2.01.0020	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	675.000.000,00	643.513.000,00	95,34%
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.407.000.000,00	2.725.878.079,00	61,85%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.407.000.000,00	2.725.878.079,00	61,85%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250.000.000,00	173.334.850,00	69,33%
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.157.000.000,00	2.552.543.229,00	61,40%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	121.225.396.050,00	82.894.790.970,00	68,38%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	121.225.396.050,00	82.894.790.970,00	68,38%
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	121.225.396.050,00	82.894.790.970,00	68,38%

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	500.000.000,00	308.615.495,00	61,72%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300.000.000,00	238.483.586,00	79,49%
1.03.11.2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	150.000.000,00	96.200.086,00	64,13%
1.03.11.2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	150.000.000,00	142.283.500,00	94,86%
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200.000.000,00	70.131.909,00	35,07%
1.03.11.2.04.00 08	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	25.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.11.2.04.00 06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	100.000.000,00	61.882.809,00	61,88%
1.03.11.2.04.00 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	75.000.000,00	8.249.100,00	11,00%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.618.906.766,00	4.617.501.590,00	82,18%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.800.000,00	152.585.250,00	56,55%
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	164.000.000,00	103.954.250,00	63,39%
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	3.915.500,00	78,31%
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.800.000,00	3.788.000,00	78,92%
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.000.000,00	40.927.500,00	42,63%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.503.094.826,00	3.413.015.229,00	97,43%
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.503.094.826,00	3.413.015.229,00	97,43%
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.000.000,00	50.224.483,00	63,58%
1.04.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.000.000,00	50.224.483,00	63,58%
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.677.086,00	208.688.617,00	68,50%

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.792.500,00	75,85%
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00	24.580.600,00	57,16%
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.111.940,00	6.414.000,00	20,62%
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	25.399.250,00	63,50%
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.565.146,00	148.502.267,00	80,03%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.484.854,00	54.800.000,00	19,13%
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	286.484.854,00	54.800.000,00	19,13%
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.900.000,00	587.491.211,00	78,55%
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	1.383.750,00	11,53%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000,00	73.113.704,00	65,28%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.900.000,00	512.993.757,00	82,22%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.950.000,00	150.696.800,00	35,21%
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	103.551.800,00	69,03%
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	47.145.000,00	94,29%
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.950.000,00	0,00	0,00%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	767.500.000,00	192.500.000,00	25,08%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	717.500.000,00	192.500.000,00	26,83%
1.04.02.2.03.00 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	700.000.000,00	175.000.000,00	25,00%
1.04.02.2.03.00 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00 %
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.04.02.2.06.00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	0,00	0,00%

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.029.000.000,00	730.291.200,00	70,97%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	385.000.000,00	228.125.950,00	59,25%
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	385.000.000,00	228.125.950,00	59,25%
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	594.000.000,00	502.165.250,00	84,54%
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	594.000.000,00	502.165.250,00	84,54%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.987.500.000,00	4.987.500.000,00	100,00 %
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.987.500.000,00	4.987.500.000,00	100,00 %
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.987.500.000,00	4.987.500.000,00	100,00 %
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	50.000.000,00	7.204.750,00	14,41%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	50.000.000,00	7.204.750,00	14,41%
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.000.000,00	7.204.750,00	14,41%
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	250.000.000	-	0,00%

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2.10.5.201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	-	0,00%
2.10.05.2.01.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	0	0,00%

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%	29,06%	87,19%	Rp 300.000.000	Rp 180.539.600	60,18%	27,01%
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	33,33%	30,69%	92,08%	Rp4.657.000.000	Rp2.861.158.724	61,44%	30,64%
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,14%	94,93%	96,73%	Rp6.599.000.000	Rp5.682.165.250	86,11%	10,62%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	100,00%	98,51%	98,51%	Rp121.660.396.050	Rp83.122.916.920	68,32%	30,19%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%	49,71%	84,93%	Rp34.590.884.900	Rp23.502.782.520	67,95%	16,99%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%	66,65%	97,09%	Rp16.449.080.000	Rp14.203.122.330	86,35%	10,74%
3	Meningkatnya Nilai AKIP Peringkat Daerah	Nilai AKIP	85,00	81,80	96,24%	Rp5.618.906.766	Rp4.617.501.590	82,18%	14,06%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa semua indicator sasarnya memiliki efektifitas dan efisiensi yang baik namun ada kondisi efisiensi yang dicapai merupakan faktor sementara dimana serapan anggarannya dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Seperti misalnya pada indicator sasaran prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi dan prosentase penurunan luasan kawasan kumuh serapan anggarannya lebih kecil daripada capaian kinerjanya sehingga tingkat efisiensinya tinggi yaitu di 30,64% dan 30,19%. Tidak hanya dilihat dari perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan, tetapi juga dari bagaimana sumber daya lainnya seperti tenaga kerja, waktu, dan teknologi dimanfaatkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Tingkat efisiensi paling rendah ada pada indicator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu 10,62%, namun maksud dari efisiensi rendah ini diartikan positif karena tingkat efisiensinya mendekati ke arah ideal yang mana anggaran yang direalisasikan hampir sebanding dengan capaian kinerjanya. Pada program perbaikan rumah tidak layak huni sudah terealisasi semua baik target kinerja maupun target anggarannya, namun pada program pengembangan perumahan yang menjadi program penunjang juga dari indicator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dan juga sebagai program pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal) disini realisasi kinerja dan anggarannya mengikuti bencana alam yang terjadi di tahun 2024. Dari target 21 rumah yang dibangun/direhabilitasi karena terdampak bencana alam hanya terealisasi 11 unit rumah yang dibangun/direhabilitasi. Capaian kinerja yang disebabkan oleh faktor alam tidak bisa dikendalikan oleh manusia sehingga bisa berdampak positif atau negative terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	67,09%	63,68%	94,92%	Rp34.590.884.900	Rp23.502.782.520	67,95%	26,97%
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	95,22%	94,58%	99,33%	Rp13.761.135.700	Rp12.338.591.000	89,66%	9,67%
1.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	249,87	249,64	96,52%	Rp2.687.944.300	Rp1.864.531.330	69,37%	27,16%
1.4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	33,33%	29,06%	87,19%	Rp4.407.000.000	Rp2.725.878.079	61,85%	25,34%
1.5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	33,33%	32,89%	98,68%	Rp121.225.396.050	Rp82.894.790.970	68,38%	30,30%
1.6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	92,16%	81,10%	88,00%	Rp500.000.000	Rp308.615.495	88,00%	0,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp)	(Rp)		
1.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	22,22	11,64	52,39%	Rp767.500.000	Rp192.500.000	25,08%	27,30%
1.8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	100,00%	83,33%	83,33%	Rp1.029.000.000	Rp730.291.200	70,97%	12,36%
1.9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2,42%	2,42%	100,00%	Rp4.987.500.000	Rp4.987.500.000	100,00%	0,00%
1.10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,67%	8,34%	50,03%	Rp50.000.000	Rp7.204.750	14,41%	35,62%
1.11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	33,33%	0	0	Rp250.000.000	Rp0	0,00%	0,00%

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas dapat dianalisa bahwa rata-rata perbandingan pencapaian kinerja kegiatan dan anggarannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tingkat efisiensinya yang cukup tinggi. Pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, capaian kinerjanya sama dengan capaian anggarannya sehingga menghasilkan tingkat efisiensi 0%. Hal ini menunjukkan kinerja yang ideal dimana capaian kinerjanya berbanding lurus dengan capaian pada anggarannya.

Selain itu masih ada beberapa sub kegiatan yang masih memiliki tingkat efisiensi 0% dimana dalam artian tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerja dan capaian anggarannya sama 0%. hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring kami untuk diupayakan kembali secara maksimal di tahun berikutnya agar kinerja seluruh kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa berjalan efektif dan efisien.

E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.11

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	87,19%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	87,19%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	50,00%	Tidak Menunjang
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	92,08%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	87,19%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	88,00%	Menunjang
					Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	60,70%	Menunjang
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	0,00%	Tidak Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,73%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	52,38%	Menunjang
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	83,33%	Menunjang
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100,00%	Menunjang
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	98,51%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	98,69%	Menunjang
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	83,33%	Menunjang
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	84,93%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	84,92%	Menunjang
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	97,09%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	99,33%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	96,52%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	96,24%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100,00%	Menunjang
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100,00%	Menunjang
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	55,00%	Menunjang
					Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	76,93%	Menunjang

Berdasarkan pada tabel diatas dijelaskan bahwa sasaran kinerja dengan beberapa indikator kinerja sasaran ditunjang oleh program-program prioritas pembangunan. Dari keseluruhan program diatas rata-rata persentase capaian kinerjanya menunjang terhadap sasaran kinerja utama Dinas seperti misalnya :

- Pada Program penataan bangunan gedung berhasil menunjang sasaran kinerja karena tingginya tingkat kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini menunjukkan bahwa proses regulasi berjalan efektif dan ada kesadaran dari pemilik bangunan untuk mematuhi aturan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi juga berhasil menunjang kinerja sasaran karena adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas konstruksi dan keselamatan bangunan.

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya juga berhasil menunjang sasaran kinerja karena hampir semua paket pekerjaan pavingisasi di kawasan strategis terlaksana dan tertata baik. Hal ini juga mendukung terhadap pengurangan luasan kawasan kumuh.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) juga menunjang sasaran kinerja lingkungan permukiman yang sehat karena pembangunan, peningkatan, perluasan dan optimalisasi SPAM jaringan perpipaannya sudah dapat diakses secara layak oleh rumah tangga di perdesaan dan perkotaan meskipun belum optimal. Hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan titik sumber air di lokasi kegiatan serta minimnya cv/rekanan yang mempunyai alat pengeboran air bersih.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Sistem Drainase sama-sama menunjang sasaran meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat karena seluruh system air limbah domestic baik yang komunal dan individual telah dikelola dengan baik sehingga mendukung akses sanitasi yang layak. Begitu juga dengan system drainase lingkungan yang telah dibangun, meskipun tidak sepenuhnya lokasi pembangunan system drainase yang terealisasi namun yang sudah terbangun juga menunjang terciptanya lingkungan yang sehat.

Beberapa Program yang tidak menunjang seperti halnya penyelesaian ganti rugi tanah dan penyediaan PSU mengalami capaian yang rendah karena kendala administrative dan juga koordinasi yang lemah. Kendala administrative seperti belum lengkapnya dokumen-dokumen persyaratan permohonan penyerahan PSU kepada pihak PemKab. Koordinasi yang lemah dalam bidang urusan pertanahan karena kami masih membangun komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan dan merencanakan studi banding dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi Jawa Timur yang memiliki nomenklatur nama Dinas yang sama.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dapat dinyatakan “Tidak Berhasil” Karena realisasi 7 dari 7 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 7 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.189.875.267.716 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 134.170.186.934 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 70,66% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 22,09 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST

NIP. 19680330 199803 1 006

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

JALAN JOKOTOLE NO. 143 PAMEKASAN, TELP. (0324) 611685

Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188/22.5/432.304/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten pamekasan Tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan pada setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - Rencana Strategis (RENSTRA)
 - Rencana Kinerja (RENJA)
 - Rencana Aksi Kegiatan
 - Perjanjian Kinerja
 - Pengukuran Kinerja
 - Pengelolaan Data Kinerja
 - Pelaporan Kinerja

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Pamekasan

KETIGA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pamekasan Housing and Urban Planning Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN' around the perimeter and 'DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN' in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'ABU HARRAM, ST' is printed below it.

ABU HARRAM, ST

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 11.2/ 432.304/ 2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Ketua	Muharram, ST.	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Mohammad Fauzi, S.Sos, MMPub.	Sekretaris
3	Anggota	Andriyani Daryanti, ST, MMT.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi, dan Air Bersih
4	Anggota	Dwi Budayana Eka Dewantara, ST.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
5	Anggota	Akh. Musthofa Anshory, ST.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
6	Anggota	Nofinda Herlianawati, ST.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
7	Anggota	Rr. Luciyana Emmy Hariyono, ST.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
8	Anggota	Lia Andriana, ST.MPWK.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
9	Anggota	Raden Abdullah Arif, ST.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
10	Anggota	Nurhayati, SH.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
11	Anggota	Zuhrufah Aini, SE., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
12	Anggota	Agus Hardyanto Kesuma, A.Md	Staf Perencanaan
13	Anggota	Bachtiar Efendi, SE	Staf Perencanaan
14	Anggota	Erly Candra Kurniawan, SP	Staf Perencanaan
15	Anggota	Septa Dwi Chandra, S.A.P	Staf Perencanaan

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

**JALAN JOKOTOLE NO.143 PAMEKASAN, Telp. (0324) 611685
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/22.2/432.304/2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024-2026 PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

Menimbang : a Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;

b Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Dokumen Perencanaan dan Acuan, Tolak Ukur Penilaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;
- KEDUA** : Isi dan Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 188/22.2/432.304/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 – 2026 Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN : Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
2. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

3. Pengelolaan Bahan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
4. Pembinaan dan pengawasan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Pemberdayaan dan pengembangan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
6. Pembinaan dan pengendalian unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	<u>Penjelasan :</u> Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. <u>Formulasi Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100 \%$	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi	<u>Penjelasan :</u> Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.. <u>Formulasi Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi}}{\text{Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah}} \times 100\%$	Dokumen Pendataan Bangunan Gedung	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan
Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	<u>Penjelasan :</u> cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. <u>Formulasi Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Kab. Pamekasan}} \times 100\%$	Data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	<u>Penjelasan :</u> Perbandingan jumlah luasan permukiman kumuh yang menurun apabila dibandingkan dengan jumlah luasan daerah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan dalam persen (%) <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/Luas Wilayah) x100%	SK Bupati tentang Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	<u>Penjelasan :</u> perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya) X 100 %	Data Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	<u>Penjelasan :</u> Perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya) X 100%	Data Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pamekasan	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB								
1	2	3	4	5								
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	<u>Penjelasan :</u> Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. <u>Penilaian SAKIP :</u> <table><tr><td>- Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td></tr><tr><td>- Pengukuran Kinerja</td><td>30%</td></tr><tr><td>- Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td></tr><tr><td>- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25%</td></tr></table>	- Perencanaan Kinerja	30%	- Pengukuran Kinerja	30%	- Pelaporan Kinerja	15%	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat
- Perencanaan Kinerja	30%											
- Pengukuran Kinerja	30%											
- Pelaporan Kinerja	15%											
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%											

Pamekasan, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



[Signature]
MUHARRAM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	33,33%
2.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,14%
		Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	100%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%
3.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp43.014.414.900	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp12.761.135.700	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1.867.944.300	APBD
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp1.279.000.000	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp5.200.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp79.796.000.000	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp400.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.275.000.000	APBD
9.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp4.000.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp100.000.000	APBD
11.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp2.000.000.000	APBD
JUMLAH		Rp151.693.494.900	APBD + APBN

Pamekasan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. BUPATI PAMEKASAN

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

MUHARRAM, ST



PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	33,33%
2.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,14%
		Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	100%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%
3.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp34.590.884.900	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp13.761.135.700	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp2.687.944.300	APBD
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp1.029.000.000	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.407.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp121.225.396.050	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp500.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp767.500.000	APBD
9.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp4.987.500.000	APBD
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp50.000.000	APBD
11.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp250.000.000	APBD
JUMLAH		Rp184.256.360.950	APBD + APBN

Pamekasan, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua

Pj. BUPATI PAMEKASAN

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

MUHARRAM, ST

Formulir E-81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan

Periode Pelaksanaan 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangka t Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Renstra Perangka t Daerah sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggara n Kinerja Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggara n Renja Perangka t Daerah yang dievalua si	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggara n Renja Perangka t Daerah yang dievalua si	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggara n Renstra Perangka t Daerah yang dievalua si	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggara n Renstra Perangka t Daerah yang dievalua si	Unit Peran gkat Daera h yang berta nggu ngjaw ab	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%	14 = 12 + 6	15 = 14 / 5 x 100%	16	F. Pend orong	F. Pen gha mba t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01. 04. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100	16.542.493.009,00	100	-	100	5.618.906.766,00	98,31	1.097.624.476,00	98,31	993.575.438,00	98,31	1.293.683.472,00	100	1.232.618.204,00	100	4.617.501.590,00	100%	82.18%	200	4.617.501.590,00	200%	27.91%	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10

		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	100		100		100		22,56		34,46		50,91		76,93		76,93		76,93%		176,93		176,93%			
01.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Perencanaan	4	588.900.000,00	4	-	4	269.800.000,00	4	-	4	13.177.750,00	4	71.362.000,00	4	68.045.500,00	4	152.585.250,00	100%	56,55%	8	152.585.250,00	200%	25,91%	-	
01.04.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	450.000.000,00	3	-	3	164.000.000,00	1	-	2	5.657.750,00	2	63.367.500,00	3	34.929.000,00	3	103.954.250,00	100%	63,39%	6	103.954.250,00	66,67%	23,1%	SEKR ETARI AT	
01.04.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	56	16.500.000,00	59	-	55	5.000.000,00	56	-	56	1.235.000,00	56	1.952.500,00	55	728.000,00	55	3.915.500,00	100%	78,31%	114	3.915.500,00	203,57%	23,73%	SEKR ETARI AT	
01.04.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	56	14.400.000,00	22	-	55	4.800.000,00	56	-	56	1.233.000,00	56	1.915.000,00	55	640.000,00	55	3.788.000,00	100%	78,92%	77	3.788.000,00	137,5%	26,31%	SEKR ETARI AT	

01.04.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	108.000.000,00	3	-	3	96.000.000,00	2	-	2	5.052.000,00	2	4.127.000,00	3	31.748.500,00	3	40.927.500,00	100%	42.63%	6	40.927.500,00	66.67%	37.9%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	1	9.772.743.009,00	1	-	1	3.503.094.826,00	1	942.222.171,00	1	792.005.008,00	1	953.545.964,00	1	725.242.086,00	1	3.413.015.229,00	100%	97.43%	2	3.413.015.229,00	200%	34.92%	-		
01.04.01.2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/BULAN	33	9.772.743.009,00	33	-	33	3.503.094.826,00	33	942.222.171,00	33	792.005.008,00	33	953.545.964,00	33	725.242.086,00	33	3.413.015.229,00	100%	97.43%	66	3.413.015.229,00	200%	34.92%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	60	892.150.000,00	36	-	60	79.000.000,00	3	-	12	23.481.483,00	24	8.180.000,00	33	18.563.000,00	33	50.224.483,00	55%	63.58%	69	50.224.483,00	115%	5.63%	-		
01.04.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	825.000.000,00	40	-	60	79.000.000,00	3	-	9	23.481.483,00	12	8.180.000,00	9	18.563.000,00	33	50.224.483,00	55%	63.58%	73	50.224.483,00	121.67%	6.09%	SEKRETARIAT		

01.04.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	5	963.000,00	5	-	5	304.677.086,00	1	-	3	33.506.485,00	4	61.623.776,00	5	113.558.356,00	5	208.688.617,00	100%	68.5%	10	208.688.617,00	200%	21.67%	-		
01.04.01.2.0.6.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.000,00	10	-	12	5.000,00	0	-	0	-	0	-	12	3.792.500,00	12	3.792.500,00	100%	75.85%	22	3.792.500,00	183.33%	21.07%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.0.6.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	126.000,00	64	-	72	43.000,00	0	-	0	-	13	7.320,50	29	17.260,10	42	24.580,60	58.33%	57.16%	106	24.580,60	147.22%	19.51%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.0.6.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	89	99.000,00	12	-	89	31.111,940,00	10	-	15	3.456,00	13	2.958,00	0	-	38	6.414,00	42.7%	20.62%	50	6.414,00	56.18%	6.48%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.0.6.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	120.000,00	7	-	7	40.000,00	0	-	3	8.049,250,00	3	8.250,00	1	9.100,00	7	25.399,250,00	100%	63.5%	14	25.399,250,00	200%	21.17%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.0.6.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	600.000,00	80	-	80	185.565,146,00	16	-	15	22.001,235,00	28	43.095,276,00	18	83.405,756,00	77	148.502,267,00	96.25%	80.03%	157	148.502,267,00	196.25%	24.75%	SEKRETARIAT		

01.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Pras ar a na	3	1.20 3.00 0.00 0,00	3	-	1	286. 484. 854, 00	0	-	0	-	1	19.1 00.0 00,0 0	1	35.7 00.0 00,0 0	1	54.8 00.0 00,0 0	10 0%	19. 13 %	4	54.8 00.0 00,0 0	13 3. 33 %	4.56 %	-		
01.04.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	55	660. 000. 000, 00	15	-	78	286. 484. 854, 00	0	-	0	-	6	19.1 00.0 00,0 0	10	35.7 00.0 00,0 0	16	54.8 00.0 00,0 0	20. 51 %	19. 13 %	31	54.8 00.0 00,0 0	56 .3 6 %	8.3 %	SEKR ETARI AT		
01.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintaha n yang disediakan	Jas a Pen unj ang	3	2.13 2.70 0.00 0,00	3	-	3	747. 900. 000, 00	3	141. 222. 305, 00	3	110. 694. 712, 00	3	158. 793. 432, 00	3	176. 780. 762, 00	3	587. 491. 211, 00	10 0%	78. 55 %	6	587. 491. 211, 00	20 0 %	27.5 5%	-		
01.04.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap ora n	2	27.0 00.0 00,0 0	2	-	2	12.0 00.0 00,0 0	2	-	2	708. 750, 00	2	675. 000, 00	2	-	2	1.38 3.75 0,00	10 0%	11. 53 %	4	1.38 3.75 0,00	20 0 %	5.13 %	SEKR ETARI AT		
01.04.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	21 7	234. 000. 000, 00	6	-	21 7	112. 000. 000, 00	54	21.8 80.7 68,0 0	54	14.8 73.7 80,0 0	54	29.3 78.3 94,0 0	55	6.98 0.76 2,00	21 7	73.1 13.7 04,0 0	10 0%	65. 28 %	22 3	73.1 13.7 04,0 0	10 2. 76 %	31.2 5%	SEKR ETARI AT		
01.04.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap ora n	30	1.87 1.70 0.00 0,00	11	-	30	623. 900. 000, 00	30	119. 341. 537, 00	30	95.1 12.1 82,0 0	30	128. 740. 038, 00	30	169. 800. 000, 00	30	512. 993. 757, 00	10 0%	82. 22 %	41	512. 993. 757, 00	13 6. 67 %	27.4 1%	SEKR ETARI AT		

01.04.01.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan	3	990.000.000,00	3	-	3	427.950.000,00	1	14.180.000,00	2	20.710.000,00	1	21.078.300,00	3	94.728.500,00	3	150.696.800,00	100%	35.21%	6	150.696.800,00	200%	15.22%	-		
01.04.01.2.0.9.0.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	450.000.000,00	5	-	5	150.000.000,00	5	14.180.000,00	5	-	5	21.078.300,00	5	68.293.500,00	5	103.551.800,00	100%	69.03%	10	103.551.800,00	200%	23.01%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.0.9.0.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	90.000.000,00	25	-	162	50.000.000,00	0	-	41	20.710.000,00	0	-	51	26.435.000,00	92	47.145.000,00	56.79%	94.29%	117	47.145.000,00	117%	52.38%	SEKRETARIAT		
01.04.01.2.0.9.0.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	19	450.000.000,00	16	-	19	227.950.000,00	0	-	0	-	0	-	8	-	8	-	42.11%	0%	24	-	126.32%	0%	SEKRETARIAT		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	%	68,09	114.930.548,00	98,33	-	67,09	34.590.849,00	0	-	0,09	165.731.410,00	45,89	1.044.604.560,00	63,68	22.292.465,00	63,68	23.502.782,00	94.92%	67.95%	162,01	23.502.782,00	237.94%	20.45%	-		

		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota																										
1.0 3.0 3.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	SPAM	7	114.930.548.588,00	10	-	7	34.590.884.900,00	0	-	1	165.731.410,00	4	1.044.604.560,00	7	22.292.446.550,00	7	23.502.782.520,00	100%	67.95%	17	23.502.782.520,00	242.86%	20.45%	-		
1.0 3.0 3.2. 01. 002 5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	3	600.000.000,00	3	192.995.000,00	4	650.000.000,00	0	-	1	82.361.100,00	1	4.046.000,00	0	7.075.000,00	2	93.482.100,00	50%	14.38%	5	286.477.100,00	166.67%	47.75%			
1.0 3.0 3.2. 01. 002 8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Literal/de tik	50	2.047.140.000,00	186	21.426.265.078,00	89	11.838.500.000,00	0	-	0	65.138.460,00	0	68.758.200,00	63	6.483.598.500,00	63	6.617.495.160,00	70.79%	55.9%	249	28.043.760.238,00	498%	1369.9%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		

1.0 3.0 3.2. 01. 002 6	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter /detik	76	1.53 0.00 0.00 0,00	19	2.67 8.76 6.81 3,00	71	15.1 65.6 67.0 00,0 0	0	-	0	5.34 0.60 0,00	2	258. 299. 660, 00	64	10.7 04.3 17.4 00,0 0	66	10.9 67.9 57.6 60,0 0	92. 96 %	72. 32 %	85	13.6 46.7 24.4 73,0 0	11 1. 84 %	891. 94%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 3.2. 01. 003 2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	49 5	500. 000. 000, 00	89 5	237. 464. 000, 00	49 5	2.87 7.08 3.00 0,00	0	-	0	-	46 2	659. 868. 050, 00	33	2.16 0.85 6.75 0,00	49 5	2.82 0.72 4.80 0,00	10 0%	98. 04 %	13 90	3.05 8.18 8.80 0,00	28 0. 81 %	611. 64%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 3.2. 01. 003 1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	9	504. 724. 000, 00	7	227. 799. 200, 00	32	3.09 9.22 4.00 0,00	0	-	0	-	0	38.0 61.9 00,0 0	28	2.11 7.46 5.00 0,00	28	2.15 5.52 6.90 0,00	87. 5%	69. 55 %	35	2.38 3.32 6.10 0,00	38 8. 89 %	472. 2%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 3.2. 01. 002 4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan	Orang	6	860. 410. 900, 00	2	845. 259. 000, 00	18	860. 410. 900, 00	0	-	0	1.15 5.00 0,00	18	5.17 7.00 0,00	0	810. 948. 900, 00	18	817. 280. 900, 00	10 0%	94. 99 %	20	1.66 2.53 9.90 0,00	33 3. 33 %	193. 23%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANIT		

	Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																							ASI DAN AIR BERS IH			
1.0 3.0 3.2. 01. 003 0	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggar aan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	100. 000. 000, 00	1	87.1 23.1 97,0 0	1	100. 000. 000, 00	0	-	0	11.7 36.2 50,0 0	1	10.3 93.7 50,0 0	0	8.18 5.00 0,00	1	30.3 15.0 00,0 0	10 0%	30. 32 %	2	117. 438. 197, 00	20 0 %	117. 44%	BIDA NG KAWA SAN PERM UKIM AN, SANIT ASI DAN AIR BERS IH		
1.0 3.0 5	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95 ,7 8	38.7 47.1 00.7 00,0 0	94 ,9 4	-	95 ,2 2	13.7 61.1 35.7 00,0 0	0	-	11 ,2 2	30.2 10.0 00,0 0	66 ,6 9	8.58 8.42 4.30 0,00	94 ,5 8	3.71 9.95 6.70 0,00	94 ,5 8	12.3 38.5 91.0 00,0 0	99. 33 %	89. 66 %	18 9, 52	12.3 38.5 91.0 00,0 0	19 7. 87 %	31.8 4%	-		
1.0 3.0 5.2. 01	Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangka n	SPA LD	13	38.7 47.1 00.7 00,0 0	13	-	10	13.7 61.1 35.7 00,0 0	0	-	3	30.2 10.0 00,0 0	5	8.58 8.42 4.30 0,00	6	3.71 9.95 6.70 0,00	6	12.3 38.5 91.0 00,0 0	60 %	89. 66 %	19	12.3 38.5 91.0 00,0 0	14 6. 15 %	31.8 4%	-		
1.0 3.0 5.2. 01. 004 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Ko ta yang Disusun	Dok ume n	2	750. 000. 000, 00	1	-	2	650. 000. 000, 00	0	-	0	-	1	53.9 79.3 00,0 0	0	136. 351. 700, 00	1	190. 331. 000, 00	50 %	29. 28 %	2	190. 331. 000, 00	10 0 %	25.3 8%	KAWAS AN PERMU KIMAN, SANITA SI DAN AIR BERSI H		

1.0 3.0 5.2. 01. 003 4	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	17	300.000.000,00	17	90.881.250,00	5	100.000.000,00	0	-	0	17.000.000,00	5	58.900.000,00	0	6.075.000,00	5	81.975.000,00	100%	81.98%	22	172.856.250,00	129.41%	57.62%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 5.2. 01. 004 0	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibangun dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	35	300.000.000,00	35	5.831.000,00	35	100.000.000,00	0	-	35	3.815.000,00	0	-	0	-	35	3.815.000,00	100%	3.82%	70	9.646.000,00	200%	3.22%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 5.2. 01. 003 5	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara	1	120.000.000,00	1	67.598.000,00	1	100.000.000,00	0	-	0	-	1	47.550.000,00	0	7.600.000,00	1	55.150.000,00	100%	55.15%	2	122.748.000,00	200%	102.29%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 5.2. 01. 003 8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	300.000.000,00	0	-	2	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		

1.0 3.0 5.2. 01. 003 7	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	unit	1	900.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 5.2. 01. 003 3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	40	300.000.000,00	0	-	40	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 5.2. 01. 002 7	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M ³ / Hari	30	1.200.000,00	24	707.279.400,00	30	1.590.033.700,00	0	-	0	9.395.000,00	23	1.127.145.000,00	7	263.175.000,00	30	1.399.715.000,00	100%	88.03%	54	2.106.994.400,00	180%	175.58%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 5.2. 01. 002 3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	M ³ / Hari	221	11.000.000,00	213	9.343.040.650,00	221	10.621.102.000,00	0	-	0	-	143	7.300.850.000,00	78	3.256.755.000,00	221	10.557.605.000,00	100%	99.4%	434	19.900.645.650,00	196.38%	180.91%	BIDAN G KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		

1.0 3.0 5.2. 01. 002 0	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Dokumen	1	200.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	100%	25%	1	50.000.000,00	100%	25%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Ha	232	2.800.000.000,00	268	15.294.443.590,00	249,87	2.687.944.300,00	249,87	-	249,87	9.790.000,00	249,74	224.706.600,00	249,64	1.630.034.730,00	249,64	1.864.531.330,00	99.91%	69.37%	517,64	17.158.974.920,00	223.12%	612.82%	-		
1.0 3.0 6.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	Sistem Drainase	2	2.800.000.000,00	2	15.294.443.590,00	2	2.687.944.300,00	0	-	0	9.790.000,00	2	224.706.600,00	2	1.630.034.730,00	2	1.864.531.330,00	100%	69.37%	4	17.158.974.920,00	200%	612.82%	-		
1.0 3.0 6.2. 01. 001 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	1600	2.000.000.000,00	7,985	7.575.326.090,00	1174	1.912.944.300,00	0	-	0	7.390.000,00	1049	184.679.400,00	86	1.028.948.930,00	1135	1.221.018.330,00	96.68%	63.83%	1142,985	8.796.344.420,00	71.44%	439.82%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		

1.0 3.0 6.2. 01. 002 3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	100.000.000,00	1	83.016.000,00	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	83.016.000,00	100%	83.02%	BIDAN GAWAS AN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 6.2. 01. 002 1	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Sistem Drainase Lingkungan	3	700.000.000,00	3	465.109.000,00	3	675.000.000,00	0	-	0	2.400.000,00	1	40.027.200,00	2	601.085.800,00	3	643.513.000,00	100%	95.34%	6	1.108.622.000,00	200%	158.37%	BIDAN GAWAS AN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 3.0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	%	100	16.354.500,00	100	-	33,33	4.407.000,00	5,42	-	16,09	37.187.750,00	23,31	357.809.240,00	29,06	2.330.881.089,00	29,06	2.725.878.079,00	87.19%	61.85%	129,06	2.725.878.079,00	129.06%	16.67%	-		
1.0 3.0 8.2. 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan	2	16.354.500,00	2	-	2	4.407.000,00	1	-	1	37.187.750,00	2	357.809.240,00	2	2.330.881.089,00	2	2.725.878.079,00	100%	61.85%	4	2.725.878.079,00	200%	16.67%	-		

1.0 3.0 8.2. 01. 002 3	Penyelenggara an Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkar an Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggara an Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok ume n	60 0	800. 000. 000, 00	24 4	132. 758. 500, 00	20 0	250. 000. 000, 00	33	-	65	37.1 87.7 50,0 0	43	49.6 70.0 00,0 0	35	86.4 77.1 00,0 0	17 6	173. 334. 850, 00	88 %	69. 33 %	42 0	306. 093. 350, 00	70 %	38.2 6%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 3.0 8.2. 01. 002 1	Pembanguna n, Pemanfaatan ,Pelestarian dan Pembongkar an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pembangun an, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Dok ume n	6	15.3 00.0 00.0 00,0 0	0	5.27 6.06 7.45 5,00	3	4.15 7.00 0.00 0,00	0	-	0	-	1	308. 139. 240, 00	1	2.24 4.40 3.98 9,00	2	2.55 2.54 3.22 9,00	66. 67 %	61. 4%	2	7.82 8.61 0.68 4,00	33 .3 3 %	51.1 7%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		

1.0 3.0 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGA NNYA	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik	%	10 0	6.18 1.80 0.00 0,00	0	-	33 ,3 3	121. 225. 396. 050, 00	0	-	0	588. 254. 160, 00	31 ,7 1	69.9 14.8 95.0 00,0 0	32 ,8 9	12.3 91.6 41.8 10,0 0	32 ,8 9	82.8 94.7 90.9 70,0 0	98. 68 %	68. 38 %	32 ,8 9	82.8 94.7 90.9 70,0 0	32 .8 9 %	134 0.95 %	-		
1.0 3.0 9.2. 01	Penyelenggar aan Penataan Bangunan dan Lingkungann ya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungann ya yang diselenggara kan	Pen ataa n Ban gun an	1	6.18 1.80 0.00 0,00	1	-	1	121. 225. 396. 050, 00	0	-	0	588. 254. 160, 00	1	69.9 14.8 95.0 00,0 0	1	12.3 91.6 41.8 10,0 0	1	82.8 94.7 90.9 70,0 0	10 0%	68. 38 %	2	82.8 94.7 90.9 70,0 0	20 0 %	134 0.95 %	-		
1.0 3.0 9.2. 01. 000 8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kaw asa n	26 6	55.6 39.9 61.4 00,0 0	57 7	91.1 72.5 64.4 20,0 0	53 5	121. 225. 396. 050, 00	0	-	0	588. 254. 160, 00	50 9	69.9 14.8 95.0 00,0 0	19	12.3 91.6 41.8 10,0 0	52 8	82.8 94.7 90.9 70,0 0	98. 69 %	68. 38 %	11 05	174. 067. 355. 390, 00	41 5. 41 %	312. 85%	BIDA NG PERU MAHA N, PRAS ARAN A SARA NA UTILI TAS UMU M DAN TATA BANG UNAN		

1.0 3.1 1	PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tek nisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	96 ,3 3	1.57 5.00 0.00 0,00	71 ,8 5	-	92 ,1 6	500. 000. 000, 00	0	-	0	31.1 45.0 00,0 0	57 ,1 4	162. 384. 479, 00	81 ,1	115. 086. 016, 00	81 ,1	308. 615. 495, 00	88 %	61. 72 %	15 2, 95	308. 615. 495, 00	15 8. 78 %	19.5 9%	-		
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	10 0		10 0		10 0		0		11 ,9 4	29 ,8 5		60 ,7		60 ,7		60. 7%		16 0, 7		16 0. 7 %					
1.0 3.1 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Pen yele ngg araan	6	975. 000. 000, 00	2	-	2	300. 000. 000, 00	0	-	0	-	2	157. 710. 647, 00	2	80.7 72.9 39,0 0	2	238. 483. 586, 00	10 0%	79. 49 %	4	238. 483. 586, 00	66 .6 7 %	24.4 6%	-		
1.0 3.1 1.2. 01. 001 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis yang Dilatih	Ora ng	30 0	600. 000. 000, 00	59	57.2 83.5 49,0 0	10 0	150. 000. 000, 00	0	-	0	-	75	55.8 04.6 47,0 0	25	40.3 95.4 39,0 0	10 0	96.2 00.0 86,0 0	10 0%	64. 13 %	15 9	153. 483. 635, 00	53 %	25.5 8%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		

1.0 3.1 1.2. 01. 001 0	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis	"Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	30 0	350. 000. 000, 00	51	75.7 18.2 00,0 0	10 0	150. 000. 000, 00	0	-	0	-	62	101. 906. 000, 00	26	40.3 77.5 00,0 0	88	142. 283. 500, 00	88 %	94. 86 %	13 9	218. 001. 700, 00	46 .3 3 %	62.2 9%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 3.1 1.2. 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	Prosen	10 0	600. 000. 000, 00	17	-	71 ,1 4	200. 000. 000, 00	0	-	8, 49	31.1 45.0 00,0 0	21 ,2 4	4.67 3.83 2,00	43 ,1 8	34.3 13.0 77,0 0	43 ,1 8	70.1 31.9 09,0 0	60. 7%	35. 07 %	60 ,1 8	70.1 31.9 09,0 0	60 .1 8 %	11.6 9%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 3.1 1.2. 04. 000 8	Penyusunan SOP/Pedoma n Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoma n Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dokumen	3	75.0 00.0 00,0 0	0	-	1	25.0 00.0 00,0 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0 %	0%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		

1.0 3.1 1.2. 04. 000 6	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lem bag a	10 0	300. 000. 000, 00	70	53.2 97.5 00,0 0	10 0	100. 000. 000, 00	0	-	24	31.1 45.0 00,0 0	0	3.49 8.53 2,00	50	27.2 39.2 77,0 0	74	61.8 82.8 09,0 0	74 %	61. 88 %	14 4	115. 180. 309, 00	14 4 %	38.3 9%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 3.1 1.2. 04. 000 4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggar aan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggar aan	Pak et Pek erja an	10 0	225. 000. 000, 00	0	-	10 0	75.0 00.0 00,0 0	0	-	0	-	36	1.17 5.30 0,00	12	7.07 3.80 0,00	48	8.24 9.10 0,00	48 %	11 %	48	8.24 9.10 0,00	48 %	3.67 %	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 4.0 2	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHA N	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ko ta	%	44 ,4 5	1.20 0.00 0.00 0,00	0	-	22 ,2 2	767. 500. 000, 00	3, 17		6, 35	11 ,6 4		11 ,6 4		11 ,6 4	52. 39 %	25. 08 %	11 ,6 4		192. 500. 000, 00	26 .1 9 %	16.0 4%	-			
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	%	44 ,4 5		0		22 ,2 2		0		0	0		0		0	0%		0		0 %						

		pemerintah kabupaten/kota																										
1.0 4.0 2.2. 03. 03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	%	100	5.25 0.00 0.00 0,00	77	612. 500. 000, 00	22 ,2 2	717. 500. 000, 00	3, 17	35.0 00.0 00,0 0	6, 35	52.5 00.0 00,0 0	11 ,6 4	70.0 00.0 00,0 0	11 ,6 4	35.0 00.0 00,0 0	11 ,6 4	192. 500. 000, 00	52. 39 %	26. 83 %	88 ,6 4	805. 000. 000, 00	88 ,6 4 %	15.3 3%	-		
1.0 4.0 2.2. 03. 000 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	100	1.75 0.00 0.00 0,00	32	560. 000. 000, 00	20	700. 000. 000, 00	2	17.5 00.0 00,0 0	3	52.5 00.0 00,0 0	5	70.0 00.0 00,0 0	0	35.0 00.0 00,0 0	10	175. 000. 000, 00	50 %	25 %	42	735. 000. 000, 00	42 %	42%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 4.0 2.2. 03. 000 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	40	1.75 0.00 0.00 0,00	15	262. 500. 000, 00	1	17.5 00.0 00,0 0	1	17.5 00.0 00,0 0	0	- 0	0	- 0	0	- 0	1	17.5 00.0 00,0 0	10 0%	10 0%	16	280. 000. 000, 00	40 %	16%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		

1.0 4.0 2.2. 06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	Persen	100	50.000,000,00	0	-	100	50.000,000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	-		
1.0 4.0 2.2. 06. 000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang /Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	50.000,000,00	0	-	1	50.000,000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BIDAN G PERUMAHAN, PRASARANA SARAN A UTILITAS UMUM DAN TATA BANGUNAN		
1.0 4.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	100	23.174,473,978,00	26,43	-	100	1.029,000,000,00	0	-	50	116.851.950,00	50	188.069.250,00	83,33	425.370.000,00	83,33	730.291.200,00	83.33%	70.97%	109,76	730.291.200,00	109.76%	3.15%	-		
1.0 4.0 3.2. 01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	prosentase	100	1.650,000,000,00	50	-	33	50.000,000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	50	-	50%	0%	-		

1.0 4.0 3.2. 01. 000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang /Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	300.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.0 4.0 3.2. 02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	Penataan	3	1.350.000.000,00	3	-	1	385.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	228.125.950,00	1	228.125.950,00	100%	59.25%	4	228.125.950,00	133.33%	16.9%	-		
1.0 4.0 3.2. 02. 000 8	Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1	-	4	-	2	385.000.000,00	0	-	0	-	0	-	2	228.125.950,00	2	228.125.950,00	100%	59.25%	6	228.125.950,00	600%	0%	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH		

1.0 4.0 3.2. 03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	Peni ngk ata n Kwa litas	3	20.1 74.4 73.9 78,0 0	2	-	1	594. 000. 000, 00	0	-	1	116. 851. 950, 00	1	188. 069. 250, 00	1	197. 244. 050, 00	1	502. 165. 250, 00	10 0%	84. 54 %	3	502. 165. 250, 00	10 0 %	2.49 %	-		
1.0 4.0 3.2. 03. 000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Lap ora n	3	2.57 2.50 0.00 0,00	3	-	3	594. 000. 000, 00	0	-	3	116. 851. 950, 00	3	188. 069. 250, 00	3	197. 244. 050, 00	3	502. 165. 250, 00	10 0%	84. 54 %	6	502. 165. 250, 00	20 0 %	19.5 2%	BIDAN G PERUM AHAN, PRASA RANA SARAN A UTILIT AS UMUM DAN TATA BANGU NAN		
1.0 4.0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1, 06	13.5 00.0 00.0 00,0 0	3, 1	-	2, 42	4.98 7.50 0.00 0,00	0	-	0	-	1, 35	3.34 2.50 0.00 0,00	2, 42	1.64 5.00 0.00 0,00	2, 42	4.98 7.50 0.00 0,00	10 0%	10 0%	5, 52	4.98 7.50 0.00 0,00	52 0. 75 %	36.9 4%	-		
1.0 4.0 4.2. 01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	Per baik an RTL H	1	13.5 00.0 00.0 00,0 0	1	-	1	4.98 7.50 0.00 0,00	0	-	0	-	1	3.34 2.50 0.00 0,00	1	1.64 5.00 0.00 0,00	1	4.98 7.50 0.00 0,00	10 0%	10 0%	2	4.98 7.50 0.00 0,00	20 0 %	36.9 4%	-		

1.0 4.0 4.2. 01. 000 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit rumah	730	13.000.000,00	347	6.072.500.000,00	285	4.987.500.000,00	0	-	0	-	159	3.342.500.000,00	126	1.645.000.000,00	285	4.987.500.000,00	100%	100%	632	11.060.000,00	86.58%	85.08%	BIDAN G PERUMAHAN, PRASARANA SARANA UTILITAS UMUM DAN TATA BANGUNAN		
1.0 4.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	27,78	200.000,00	5,56	-	16,67	50.000,00	0	-	0	7.204.750,00	0	-	8,34	-	8,34	7.204.750,00	50.03%	14.41%	13,9	7.204.750,00	50.04%	3.6%	-		
1.0 4.0 5.2. 01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Prosen	100	200.000,00	22	-	33	50.000,00	0	-	0	7.204.750,00	0	-	16,67	-	16,67	7.204.750,00	50.52%	14.41%	38,67	7.204.750,00	38.67%	3.6%	-		

1.0 4.0 5.2. 01. 000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	6	175.000.000,00	1	33.500.000,00	2	50.000.000,00	0	-	0	7.204.750,00	0	-	1	-	1	7.204.750,00	50%	14.41%	2	40.704.750,00	33.33%	23.26%	BIDAN G PERUMAHAN, PRASARANA SARANA UTILITAS UMUM DAN TATA BANGUNAN		
2.1 0.0 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	100	6.300.000.000,00	0	-	33,33	250.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	-		
2.1 0.0 5.2. 01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Koordinasi	1	6.300.000.000,00	0	-	1	250.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	-		

2.1 0.0 5.2. 01. 000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	6.30 0.00 0.00 0,00	0	-	1	250.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BIDANG PERUMAHAN, PRASARANA SARA NA UTILITAS UMUM DAN TATA BANGUNAN		
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			72.42%	51.9%								
Predikat Kinerja																			Se da ng	Re nd ah								